



HASIL RUMUSAN RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT SURABAYA, 4 – 6 NOVEMBER 2008

PADA HARI INI KAMIS, TANGGAL ENAM BULAN NOVEMBER TAHUN DUA RIBU DELAPAN, TELAH DILAKSANAKAN PEMBAHASAN RUMUSAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2008 YANG TELAH DISAMPAIKAN DAN DISEPAKATI SECARA BERSAMA OLEH TIM PERUMUS DENGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT:

1. DITJEN HUBDAT BERSAMA-SAMA DENGAN DINAS PERHUBUNGAN/LLAJ PROVINSI DAN KAB/KOTA, PERLU MENGEMBANGKAN INOVASI DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN DINAMIKA YANG ADA DI MASYARAKAT.
2. DITJEN HUBDAT BERSAMA-SAMA DENGAN DINAS PERHUBUNGAN/LLAJ PROVINSI DAN KAB/KOTA PERLU MELAKUKAN MODERNISASI DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
3. UNTUK MENDUKUNG GOOD GOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT PERLU DIBANGUN ATAU DIKEMBANGKAN DATA BASE YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SEPERTI PERIJINAN, PENETAPAN TRAYEK DAN LINTAS, PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, PENGELOLAAN TERMINAL, JEMBATAN TIMBANG, ANGKUTAN PENYEBERANGAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS SERTA PENEGAKAN HUKUM.
4. DITJEN HUBDAT BERSAMA-SAMA DENGAN DINAS PERHUBUNGAN/LLAJ PROVINSI DAN KAB/KOTA DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM KEPADA MASYARAKAT DAN KELANCARAN SERTA KETERTIBAN LALU LINTAS DI PERKOTAAN PERLU MENGEMBANGKAN ANGKUTAN UMUM DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN DAERAH UNTUK PENATAAN LALU LINTAS SEPEDA MOTOR SERTA FASILITAS PEJALAN KAKI.
5. DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN "ROADMAP TO ZERO ACCIDENT" DINAS PERHUBUNGAN/LLAJ PROVINSI DAN KAB/KOTA PERLU :
 - A. MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT.
 - B. MENINGKATKAN KOORDINASI PENANGANAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT MELALUI FORUM KOORDINASI ANTAR INSTANSI, SEKTOR SWASTA, ASSOSIASI DAN MASYARAKAT DI DAERAH
 - C. MELAKUKAN SOSIALISASI, PUBLIKASI, DAN KAMPANYE KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT SECARA BERKELANJUTAN.
 - D. MENYUSUN ACTION PLAN UNTUK PENDIDIKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT KHUSUSNYA PENDIDIKAN USIA DINI.
 - E. MENGAKTIFKAN PERAN DAN FUNGSI UNIT PENELITIAN KECELAKAAN (UPK) DALAM RANGKA MELAKUKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN.
 - F. PEMENUHAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT BERUPA PERLENGKAPAN JALAN DAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN SERTA PENANGANAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN.

6. UNTUK Mendukung Kebijakan "Road Map to Zero Overloading" :
 - A. Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi perlu meningkatkan pengawasan muatan angkutan barang sesuai ketentuan yang berlaku dan menghapus segala bentuk pungutan.
 - B. Dinas Perhubungan/LLAJ Kab/Kota perlu melakukan pengawasan terhadap bangkitan angkutan barang (kawasan pertambangan, industri, kehutanan, dll) secara uji petik dengan peralatan timbangan portable
 - C. Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi dan Kab/Kota melakukan penertiban terhadap kesesuaian dimensi kendaraan bermotor.
 - D. Secara bertahap mengurangi peran jalan dalam angkutan barang dengan mengalihkan ke moda lain (sungai, kereta api, pelayaran pantai, dll.)
7. Ditjen Hubdat mendukung secara selektif prioritas bagi Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi dan Kab/Kota yang mengembangkan inovasi dan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan transportasi darat.
8. Ditjen Hubdat akan meningkatkan pengembangan angkutan perintis di sub sektor perhubungan darat.
9. Ditjen Hubdat bersama-sama dengan Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi dan Kab/Kota akan lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas diklat-diklat teknis yang akan dilaksanakan.
10. Ditjen Hubdat akan mendukung daerah yang berpotensi bagi pengembangan angkutan sungai.
11. Dinas Perhubungan Provinsi melakukan evaluasi per 6 bulan dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Demikian Hasil Rumusan Rakornis Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SURABAYA, 4 – 6 November 2008

1. **An. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Lampung**

Ir. IRWAN DHANI

2. **Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DI. Yogyakarta**

Ir. MULYADI HADIKUSUMO

3. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Ir. OBER GULTOM, MT

5. **An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU**

ABDULLAH MARASABESSY, SH

4. **An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

CH. S. M. SONDAKH, SH

6. **KETUA BIDANG MATERI, PERSIDANGAN
DAN NOTULEN**

Ir. HOTMA P. SIMANJUNTAK

PERWAKILAN TIM PERUMUS RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT 2008

1. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA PROVINSI N. A. D.
Prof. Dr. Ir. YUWALDI AWAY, M.Sc
2. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG
Ir. IRWAN DHANI
3. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI. JAKARTA
Drs. HENDAH SUNUGROHO, MStR
4. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DI. YOGYAKARTA
Ir. MULYADI HADIKUSUMO
5. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
Ir. SUDIRMAN LAMBALI, S.Sos, M.Si
6. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Ir. OBER GULTOM, MT
7. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI UTARA
CHRIS SONDAKH
8. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU
B. GASPERZ
9. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
FREDIK MESAK SOLO, S. IP
10. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA
..... Atau Kab/Kota yg mewakili